

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **6.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian maka penulis dapat menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut.

1. Penerapan anggaran kas yang meliputi penerimaan kas, pengeluaran kas dan saldo kas pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT tidak dilakukan dengan baik. Dalam penerapan anggaran kas, bendahara penerimaan dan pengeluaran tidak membuat anggaran kas namun membuat Daftar Kas saja. Bendahara penerimaan dan pengeluaran hanya membuat Daftar Kas yang merupakan sebuah dokumen sederhana untuk menampung kas yang ada pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT.
2. Prosedur transaksi kas atau mekanisme pencatatan kas tidak dibuat secara lengkap oleh petugas yang terkait pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT.
3. Telah terjadi defisit anggaran kas pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT yang disebabkan karena pengeluaran lebih besar daripada penerimaan.
4. Terjadi dua fungsi yaitu daftar kas dijadikan sebagai anggaran kas dalam mencatat transaksi kas pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT. Dengan adanya dua fungsi atau fungsi ganda ini maka dapat ditarik sebuah kesimpulan yakni, belum terciptanya pengendalian interen di Instansi ini dilihat dari segi pencatatannya.

#### **6.2 Saran**

1. Perlunya pelatihan khusus bagi bendahara penerimaan dan pengeluaran pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT agar dapat membuat anggaran kas sesuai dengan peraturan pemerintah yakni berdasarkan Permendagri No. 13 Tahun 2006.

2. Perlu adanya sanksi/teguran bagi pegawai yang bersangkutan yang tidak melaksanakan tugasnya berkaitan dengan anggaran kas sesuai dengan permendagri No 13 tahun 2006.
3. Pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Kelautan dan Perikanan perlu memiliki mekanisme anggaran kas yang merujuk pada Permendagri No. 13 Tahun 2006 sehingga kas daerah dapat dioptimalkan dan tidak terjadi defisit anggaran pada tahun 2010. Untuk optimalisasi manajemen kas, pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT perlu memiliki instrumen pendukung berupa anggaran kas sesuai dengan peraturan yang berlaku.
4. Diperlukannya akurasi perencanaan yang tinggi terutama berkaitan dengan aliran kas antara pemerintah dan sistem perbankan dengan saldo akhir kas dalam rekening pemerintah sehingga dapat mengakomodir kas dengan baik.

## DAFTAR PUSTAKA

Allen, Richard & Daniel Tommasi. 2001 *Managing Public Expenditure: A Reference Book for Transition Countries*. Paris: OECD.

Coe, Charles K. 1989. *Public Financial Management*. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice Hall.

Jones, Bernard. 1996. *Financial Management in the Public Sector*. London: The McGraw-Hill Companies.

**Laporan Survey Pengukuran Manajemen Keuangan Publik Provinsi Nusa Tenggara Timur**, Penerbit ANTARA, Kupang. 2009.

Mahmudi. 2010. *Manajemen Keuangan Daerah*. Penerbit Erlangga. Jakarta.

Mike.williams@mj-w.net

Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2006 tentang *Standar Akuntansi Pemerintahan*.

Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.

Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang *Perbendaharaan Negara*.